

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Negeri 9 Samarinda Tahun Pembelajaran 2020/2021

Rahma Mai Lani Rahayu
University Mulawarman
ayukim50@gmail.com

Reza
University Mulawarman
reza_pendeko79@yahoo.co.id

Noor Ellyawati
University Mulawarman
noor.ellyawati@fkip.unmul.ac.id

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Zoning System Policy in New Student Admissions (PPDB) at SMP Negeri 9 Samarinda for the 2020/2021 Academic Year. This research uses descriptive research with a qualitative approach. In this case the data were collected using observation, documentation and interviews. The theory used in this study uses George C. Edward III's theory. The results of this study indicate that the implementation of the zoning system policy at SMP Negeri 9 Samarinda has gone well when viewed from the indicators consisting of 4 (four) ranging from communication, resources, bureaucratic structure, and disposition. Communication is the most important priority, because the socialization of policies to groups of facilities must be done clearly and clearly. One of the supporters of policy implementation is community participation.

Keywords: *Implementation, Policy, Zoning System, PPDB*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 9 Samarinda Tahun Ajaran 2020/2021. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini data dikumpulkan menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori milik George C. Edward III. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 9 Samarinda sudah berjalan dengan baik jika di tinjau dari indikator yang terdiri dari 4 (empat) mulai dari komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi. Komunikasi merupakan prioritas yang paling penting, karena sosialisasi kebijakan kepada kelompok sarana harus dilakukan secara jelas dan gamblang. Salah satu pendukung implementasi kebijakan adalah partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Sistem Zonasi, PPDB

PENDAHULUAN

Dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang diterapkannya sistem zonasi sebagai salah satu jalur PPDB untuk menjamin penerimaan peserta didik baru secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. Dalam Permendikbud no. 51 Tahun 2018 dalam penerapannya sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari daya tampung.

Pendekatan model implementasi George C. Edward III yang meliputi sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, dan disposisi akan digunakan oleh peneliti dalam kajian implementasi ini.

Sistem zonasi merupakan kriteria utama penerimaan siswa baru (PPDB) yang menitikberatkan pada jarak antara tempat tinggal calon siswa dengan satuan pendidikan. Selain itu, karena sekolah akan menerima calon siswa, maka dengan adanya sistem zonasi ini akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas guru harus ditingkatkan agar dapat melatih siswa dengan baik.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun pelajaran baru di mana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan. Sebelum diberlakukannya sistem zonasi di Samarinda, SMP Negeri 9 Samarinda sudah menggunakan sistem rayon sekolah. Artinya zona wilayah untuk rayon sekolah sudah ditentukan. Namun sebelum adanya zonasi sistem PPDB secara mandiri dari sekolah masih diperbolehkan. Sejak diberlakukannya sistem zonasi tahun 2018, tidak ada lagi PPDB yang dibuka secara mandiri.

Penerapan sistem partisi untuk mengupayakan pemerataan pendidikan. Dengan menghilangkan opini publik tentang kastanisme dan favoritisme pada sistem pendidikan. Penerapan sistem zonasi ini sudah diberlakukan pada beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah kota Samarinda yang menerapkan PPDB pada tahun 2018.

Namun ternyata dalam implementasinya, PPDB di SMP Negeri 9 Samarinda banyak siswa yang tidak bisa masuk akibat dampak dari sistem zonasi tersebut. Meskipun sistem zonasi diberlakukan untuk menangani pemerataan pendidikan, disamping itu terdapat permasalahan baru yang muncul akibat dari dampak sistem zonasi tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 9 Samarinda Tahun Ajaran 2020/2021.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Data sekunder bersumber dari wawancara dan dokumentasi oleh SMP Negeri 9 Samarinda. Sedangkan data primer bersumber dari 1 kepala sekolah, 1 ketua panitia, dan 5 wali murid. Alasan kenapa peneliti mengambil rancangan deskriptif karena dapat memperoleh informasi dengan cara kehadiran peneliti dilapangan. Sehingga metode ini merupakan metode yang tepat karena dapat memberikan kajian yang komprehensif terkait implementasi sistem zonasi.

Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada bulan september 2020. Tempat penelitian dilakukan di SMP Negeri 9 Samarinda. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SMP Negeri 9 Samarinda merupakan sekolah yang terletak di Jalan Sultan Alimuddin, yang berdiri pada tahun 1984 dengan status tanah dan bangunan adalah milik pemerintah Kota Samarinda. Sekolah ini terdiri atas kelas VII, VIII, IX. Siswa yang peneliti gunakan untuk penelitian merupakan siswa kelas VII.

Hasil

Semenjak diluncurkannya atau diturunkannya kebijakan No. 51 Tahun 2018 tentang sistem zonasi guna memperlancar penerapan kebijakan harus mampu menjalankan keputusan yang dibuat oleh pemerintah sesuai aturan yang telah ditetapkan serta bertanggung jawab akan implementasinya.

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, mengemukakan bahwa implementasi kebijakan diperlukan karena dilatar belakangi oleh adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan, setidaknya ada 4 (empat) faktor yang secara langsung mampu atau tidak langsung mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

Berdasarkan teori George C. Edward III terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi pada SMP Negeri 9 Samarinda, maka hasilnya sebagai berikut:

1. Sumber Daya

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sumber daya memegang peran penting dan menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Apabila para pelaksana kebijakan yang memegang tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana secara efektif pula.

Sumber daya yang ada dalam kebijakan mengenai sistem zonasi di SMP Negeri 9 Samarinda ini terdapat kesediaan sumber daya manusia yang mendukung pengimplementasian dari kebijakan sistem zonasi tersebut. Dalam hal pendidikan dan tenaga kependidikan yang bertugas sebanyak 21 orang. Selain sumber daya manusia, terdapat sumber daya non-manusia lainnya, seperti dana (keuangan) untuk mendukung jalannya kebijakan yang sejalan dengan rencana, sehingga kebijakan yang dibuat dapat dilakukan secara efektif.

2. Komunikasi

Sebelum implementasi dilakukan harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada aparat pelaksana dan masyarakat dengan jelas dan gamlang agar masyarakat dapat benar-benar memahami kebijakan sistem zonasi. Proses sosialisasi yang dilakukan dengan berbagai metode seperti penumunan secara *online*, penempelan brosur di papan pengumuman, spanduk di gerbang sekolah, dan pembukaan layanan informasi bagi masyarakat. Dalam hal ini instruksi yang diberikan oleh kepala sekolah kepada panitia PPDB SMP Negeri 9 Samarinda sudah cukup baik dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada masyarakat tentang sistem zonasi dalam PPD juga sudah cukup baik.

3. Struktur Birokrasi

Adanya sturuktur birokrasi dilakukan agar terjadi fragmentasi atau penyebaran tanggung jawan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain pembentukan tim penyebaran tanggung jawab dalam struktur birokrasi juga terdapat SOP dalam pelaksanaamkebijakan yang disebarakan kepada seluruh pihak pelaksana kebijakan sistem zonasi.

Setiap individu diatur penempatannya pada setiap unit kerja dalaam jenjang struktur organisasistruktur organisasi SMP Negeri 9 Samarinda terdiri atas kepala sekolah, waka kurikulum, waka bidang kesiswaan, kepala tata usaha, waka humas, wali kelas, guru dan staf tata usaha.

4. Disposisi

Komitmen sangat dibutuhkan agar kebijakan atau program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Komitmen yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dan SMP Negeri 9 Samarinda dengan cara adanya pelaporan yang dilakukan oelh pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan.

Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan SMP Negeri 9 Samarinda mendukung dengan adanya kebijakan sistem zonasi. Dengan adanya sistem zonasi ini sekolah merasa kebijakan ini sebuah tantangan baru karena sebelumnya SMP Negri 9

Samarinda mendapatkan input siswa yang homogen. Dengan adanya zonasi ini SMP Negeri 9 Samarinda mendapatkan input siswa yang heterogen.

Pembahasan

Pelaksanaan PPDB sistem zonasi menurut teori Gerge C. Edward III ada empat aspek dalam implementasi kebijakan yaitu sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, dan disposisi. Keempat aspek ini harus dilaksanakan secara bersamaan karena memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan.

Fokus penelitian ini adalah implementasi penerimaan peserta didik baru, penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi, pendukung dan kendala apa yang menghambat berjalannya kebijakan Pemendikbud Nomer 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMP Negeri 9 Samarinda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu informan penelitian dan kuota penerimaan sistem zonasi

Dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi yang tertuang pada keputusan Pemendikbud No.51 Tahun 2018 yang dimana pendaftarannya terdiri dari 3 jalur zonasi (75%) yang terbagi menjadi jalur zonasi reguler (60%) dan jalur afirmasi (15%), jalur prestasi (20%) yang terbagi menjadi prestasi akademik (15%) dan non-akademik (5%), sedangkan jalur perpindahan orang tua (5%). Domisili peserta didik berdasarkan pada KK yang diterbitkan 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB untuk memastikan radius zona terdekat peserta didik terhadap sekolah.

Sekolah juga wajib untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau surat domisili sesuai dengan satuan sekolah asal. Dengan begitu, jarak tempat tinggal ke sekolah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penerimaan calon peserta didik. Klasifikasi zonasi persekolah bisa didasarkan pada kelurahan domisili pendaftaran atau jarak tempuh perkilometer dari rumah ke sekolah maksimal ± 2 kilometer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan terdapat empat aspek: pertama, sumber daya manusia, dalam hal ini SMP Negeri 9 Samarinda memiliki wewenang untuk menjalankan sebuah implementasi kebijakan tersebut. Selain sumber daya manusia terdapat juga sumber daya non manusia atau keuangan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan agar berjalan efektif
2. Komunikasi, yang dimana SMP Negeri 9 Samarinda sebagai implementor melakukan komunikasi dengan cara sosialisasi kepada masyarakat mengenai implementasi

kebijakan yang dijalankan agar seluruh elemen dapat mengetahui kebijakan sistem zonasi dalam PPDB.

3. Struktur birokrasi, dalam sebuah implementasi tentunya ada pembagian kewenangan agar menjalankan sebuah kebijakan tidak tumpang tindih dengan pihak lain
4. Disposisi, mencakup kesediaan komitmen untuk melakukan sebuah kebijakan. Dalam pembagian tugas dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pihak sekolah membagi tugas masing-masing tim dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, A. R., Karsidi, R., & Haryono, B. (2019). Cultural Lag Dalam Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dengan Sistem Zonasi Tahun 2018 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sukoharjo. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*, 3(1), 1-13.
- Anisa, Takdir, M., & Anshar, S. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada SD Negeri 21 Jati Utara Kecamatan Padang Timur Kota Padang. *Jurnal Ilmu Ekontrans & Erudisi*, 1(1), 52-65.
- Marina, K. (2019). "Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung". *Skripsi FISIP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Mashudi, A. (2019). Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 186-206.
- Mentri, P. d. (2017). Sistem Baru Penerimaan Peserta Didik Baru. *Majalah Media Komunikasi dan Inspirasi Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Moleong, L. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Nurlailiyah, A. (2019). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Prilaku Siswa SMP di Yogyakarta. *Jurnal Realita*, 17(1), 13-21.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triwiniastuti C. S, & Sulasmono B. S. (2020). Evaluasi Program PPDB Berbasis Zonasi di SMP Negeri 2 Pabelan . *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 33-46.
- Wijaya, C., Fuadi, A., & Hasibuan, S. (2020). Implementasi Kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menegah Pertama Kabupaten Langkat. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 162-177.